

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai peran UNI EROPA (EU) dalam mengatasi krisis ekonomi Yunani, penulis membagi dalam tiga pokok pembahasan, diantaranya peran Uni Eropa, krisis ekonomi, dan bagaimana kebijakan internal Yunani dalam mengatasi krisis. Untuk memudahkan penelitian ini, penulis mengambil dari tulisan maupun penelitian terdahulu.

Cukup banyak literatur yang membahas perihal Uni Eropa dalam mengatasi krisis ekonomi Yunani, diantaranya penelitian yang di tulis oleh Manolis Galenianos dalam *crisis observatory* 2015 yang berjudul “ *the greek crisis: origins and impications*”. memiliki pandangan bahwa krisis Yunani dan eurozone adalah hasil dari pemborosan fiskal, yang menganggap penghematan adalah sebagai kebijakan utama untuk keluar dari krisis. Pengamatan ini menunjukkan bahwa asal usul krisis *eurozone* dapat ditemukan dalam ketidak seimbangan eksternal daripada fiskal, implikasinya adalah bahwa fokus kebijakan eksklusif pada pengurangan defisit fiskal salah arah dan harus di bantu untuk mengurangi defisit eksternal dengan memulihkan daya saing. prespektif ini memiliki tiga Implikasi penting: pertama, pemerintah Yunani secara uni bertanggung jawab atas kesulitan yang telah menimpa negara karena bisa berperilaku bijaksana namun memilih untuk tidak; kedua, agar Yunani keluar dari

krisis, cukuplah untuk mengurangi defisit dan utang publik; ketiga, krisis eurozone saat ini bisa dihindari seandainya Yunani tidak masuk dalam zona Eropa **(Galenianos,2015: 3)**.

Perbedaan tulisan yang dilakukan oleh Galenianos dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah melihat dari aspek penyelesaian masalah krisis ekonomi Yunani, dimana penulis menitikberatkan penyelesaian masalah melalui tindakan yang dibuat oleh Uni Eropa, penulis disini melihat krisis yang dialami oleh Yunani harus ada solusi dari Uni Eropa sebagai organisasi regional yang menaungi Yunani.

Selanjutnya, Triesanto Romulo Simanjuntak dan Tunjung Wijanarka dengan tulisannya yang berjudul "masa depan Uni Eropa setelah krisis Yunani". dari tulisannya menjelaskan Serangan awal yang melanda rumah tangga ekonomi Yunani terbongkar ketika pemerintahan baru Yunani tahun 2009 mengetahui adanya defisit anggarannya bukan 3,7% seperti diketahui, tetapi menyentuh angka 14% terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan kata lain, sistem perbankannya hampir runtuh seketika. Inilah akar informasi yang memberitahu bahwa utang pemerintah sudah menggunung sehingga negara seperti Yunani sudah di ambang kebangkrutan.

Cara yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan Yunani salah satunya adalah dengan kebijakan "*Lender of Last Resort/ (LoLR)*", yang kembali menjadi tumpuan utama untuk digunakan oleh Bank Sentral Uni Eropa dan Yunani agar dapat mencegah kebangkrutan ekonomi mereka. Sejak Mei 2010, anggota negara-negara di Zona Euro dan IMF (*International Monetary Fund*)

telah memberikan bantuan keuangan kepada Yunani melalui “*Economic Adjustment Programme/ (EAP)*” untuk mencegah dampak negatif yang lebih besar ke keuangan Yunani. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak efektif. Setelah dua kali mendapatkan dana bailout²⁷, Yunani masih belum mampu untuk mempertahankan keuangannya dengan baik. Selain itu, Yunani harus menanggung tanggungan yang lebih besar dari total GDP dengan total 144%²⁸. Wacana mengenai bailout ketiga mulai dikumandangkan, namun masih belum terealisasi.

Dana talangan dari IMF pun nyata bergulir ke Yunani sebesar 110 miliar euro pada Mei 2010. Dana tersebut bertujuan untuk membuat Yunani bangkit kembali sekaligus menghindari Eropa dari krisis yang sangat parah. Namun, setahun setelah suntikan dana talangan tersebut Yunani tampaknya benarbenar kewalahan, dan sulit bangkitkembali.. Gelombang kedua dana talangan disuntikkan lagi, bahkan melibatkan swasta untuk ikut menanggung beban krisis agar dapat membantu recovery perekonomian Yunani (**Simanjuntak dan Wijanarka, 2014: 6**).

Lalu, marianne gogstad, ali m.kutan dan yaz gulnur muradoglu dalam jurnalnya yang berjudul “*do international institution affect financial market?:evidance from the greek sovereign debt crisis*”. mempelajari reaksi pasar keuangan dan sektor riil terhadap berita terkait kebijakan dari lembaga internasional utama: Dana Moneter Internasional (IMF), dan kantor Uni Eropa (UE) termasuk Komisi Eropa (EC) , Bank Sentral Eropa (ECB), menteri Area Eropa (EA) dan Uni Eropa sendiri. Secara keseluruhan, makalah ini memberikan bukti komprehensif tentang peran lembaga Internasional, pembuat kebijakan

regional, dan respons publik dalam mendorong perilaku pasar keuangan selama krisis keuangan besar. Kontribusi lain dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini meneliti dampak dari beberapa institusi (IMF dan institusi UE) di pasar keuangan dalam pengaturan serikat moneter. Namun ada kejanggalan dimana dana bailout yang seharusnya untuk mengangkat perekonomian Yunani justru malah makin menenggelamkan Yunani dalam hutang, dan perekonomian Yunani juga tidak kunjung membaik.

Perbedaan paling mendasar dari tulisan yang dibuat oleh marianne gogstad, ali m.kutan dan yaz gulnur muradoglu adalah tulisan mereka menitikberatkan persoalan krisis Yunani ada peran dari kebijakan istitusi keuangan dunia, sedangkan penelitian dari penulis lebih pada peran dari organisasi regional yang mana bekerjasama dengan isntitusi keuangan dunia dlaam penyelesaian krisis ekonomi Yunani (**Gogstad dan Kutan,2014: 1-2**).

2.2 kerangka Teoritis

Untuk mempermudah proses penelitian, tentu diperlukan adanya landasan berpijak untuk memperkuat analisa. Maka dari itu, dalam melakukan pengamatan dan analisa masalah yang diangkat, diperlukan landasan teori ataupun konseptual yang relevan.

2.2.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas Negara oleh state actor maupun non-state actor memiliki berbagai macam pengertian. Dalam buku “Pengantar Ilmu Hubungan

Internasional” Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani. menyatakan bahwa:

“Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas Negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu Negara yang menutup diri terhadap dunia luar” **(Perwita & Yani, 2005:3-4).**

Hubungan internasional dapat dilihat dari berkurangnya peranan Negara sebagai aktor dalam politik dunia dan meningkatnya peranan aktor-aktor non Negara. Batas-batas yang memisahkan bangsa-bangsa semakin kabur dan tidak relevan. Bagi beberapa aktor non-Negara bahkan batas-batas wilayah secara geografis tidak dihiraukan **(Perwita & Yani, 2005:3).**

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara Negara-negara di dunia. Pasca Perang Dingin, isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu high politics (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu low politics (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, dan terorisme) **(Perwita dan Yani, 2005:7).**

Dalam usaha sebuah Negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan

kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di Negaranya sendiri. Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional:

1. Negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
2. Kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing Negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari Negara-negara anggotanya, tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri (**Sugiono, 2006:6**).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai Negara dan Bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (**Perwita dan Yani, 2005:33-34**).

Menurut penjelasan diatas, pada perkembangannya, kerjasama internasional kini tidak hanya dilakukan oleh negara dengan negara saja, tetapi

aktor lain seperti organisasi internasional, individu dan organisasi non-pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional, dan aktor-aktor tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan sendiri dalam melaksanakan kerjasama internasional. Seperti Uni Eropa yang berperan dalam mengatasi krisis ekonomi Yunani, yang dimana Uni Eropa tidak dapat melakukan hal tersebut tanpa ada kesepakatan dan kerjasama dari negara-negara anggota serta organisasi internasional.

2.2.2 Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi politik internasional mulai menjadi kajian hubungan internasional pasca perang Dunia II sekitar tahun 1970-an, baik hubungan internasional dan ekonomi politik internasional dapat menjadi subbidang dalam disiplin studi internasional, ekonomi politik internasional sendiri pada awalnya hanya di anggap sebagai politik tingkat rendah karena sebelumnya dunia hanya menganggap peperangan adalah fokus utama dari setiap negara dalam membuat hegemoni di dunia.

Secara umum ekonomi-politik internasional merupakan studi yang mempelajari saling keterhubungan antara ekonomi internasional dan politik internasional. Ekonomi-politik internasional secara sederhana dapat pula diartikan sebagai interaksi global antara politik dan ekonomi (**jackson dan soerensen,2013:83**). Konfigurasi pendekatan ekonomi politik internasional adalah tidak tunggal (monodisiplin). Artinya, implementasi alat-alat analisisnya dapat dilihat pada sejumlah teori dan konsep-konsep yang mendasari substansi ekonomi politik, seperti interpedensi, depedensi, keterbelakangan pertumbuhan, perkembangan, pembangunan ekonomi sosial, sistem-sistem ekonomi dan

termasuk juga persoalan power politics, realism, dan idealism, linier dan strukturalis internasional, globalisasi, atau regionalism, dan lain-lain (Ikbar,2002).

Ini berarti bahwa studi ekonomi politik internasional adalah studi tentang hubungan antara politik domestik dengan ekonomi internasional setiap negara atau sebaliknya atau studi tentang dampak kekuatan pasar yang beroperasi dalam ekonomi internasional terhadap politik domestik negara-negara tertentu misalnya yang berada dalam satu regional seperti negara-negara Uni Eropa. Ekonomi terkait dengan penciptaan dan pendistribusian kekayaan, sedangkan politik terkait dengan penciptaan dan pendistribusian kekuasaan.

Bila kita melihat apa yang terjadi di Yunani, negara ini mengalami krisis dimulai pada tahun 2008 yang berdampak pada kestabilan sosial, politik dan ekonomi. Dampak dari krisis Yunani bagi Uni Eropa adalah melalui mata uang Euro yang diterapkan untuk setiap negara yang tergabung dalam Uni Eropa, mata uang Euro sendiri seperti dua mata pisau yang bisa menguntungkan namun juga bisa melukai diri sendiri, kuatnya mata uang Euro menjadi masalah bagi negara-negara Uni Eropa dengan ekonomi yang lemah, hal itulah yang terjadi di Yunani dan berdampak bagi kestabilan ekonomi politik di dataran Eropa.

2.2.3 Regionalisme

Konsep regionalisme diakibatkan oleh gelombang globalisasi dimana menjadikan dunia lebih kecil dan memungkinkan terjadinya penyatuan wilayah baik dalam arti geografi, ekonomi, politik dan budaya. (Perwita dan Yani, 2005)

Regionalisme dapat di klasifikasi dalam 5 karakteristik:

1. Negara-negara yang tergabung dalam suatu kawasan memiliki kedekatan geografis.
2. Memiliki kemiripan sosiokultural.
3. Memiliki kemiripan sikap dan tindakan politik dalam organisasi internasional.
4. Kesamaan keanggotaan dalam organisasi internasional.
5. Adanya ketergantungan ekonomi yang di ukur dari perdagangan luar negeri sebagai bagian dari proporsi pendapatan nasional.

Menurut louis cantori dan steven spiegel, mendefinisikan regionalisme sebagai “dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial dan sejarah dan adanya aksi dan tindakan dari negara-negara di luar kawasan’.Kerjasama antar negara-negara yang berada dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan bersama adalah salah satu tujuan utama mengemukanya regionalisme. Dengan membentuk organisasi regional, maka negara-negara tersebut telah menggalang bentuk kerjasama intra-regional Pada dasarnya, regionalisme muncul seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia dan negara. Ketika suatu negara membutuhkan keunggulan dan potensi negara lain, maka pada saat itu pula negara tersebut akan melihat kerjasama sebagai solusi yang memiliki proyeksi cerah. Regionalisme hanyalah suatu bentuk kerjasama dalam aspek kesamaan geografis, sejarah, budaya, dan lain sebagainya.

Jika kita melihat apa yang terjadi di Yunani, tentu sangat terikat dengan konsep regionalisme, krisis ekonomi yang melanda Yunani terjadi di kawasan Eropa dan Yunani sendiri tergabung dalam regionalisme Uni Eropa (EU), apalagi Uni Eropa menerapkan mata uang Euro bagi negara-negara yang tergabung dalam kawasannya, penerapan mata uang yang sama tersebut pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi bagi negara-negara di kawasan Uni Eropa, dengan terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di Yunani tentu sangat mempengaruhi kestabilan ekonomi dan politik di dataran Eropa (**Perwita dan Yani, 2005: 104-107**).

2.2.4 Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan salah satu kajian dalam studi hubungan internasional dan juga sebagai aktor dalam hubungan internasional, pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional (**Perwita & Yani, 2005: 91**).

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Lebih lanjut, upaya mendefinisikan organisasi internasional harus dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu proses pemikiran peraturan-peraturan

yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor non- negara. Michael hass memiliki dua pengertian tentang organisasi internasional:

1. Sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan.
2. Organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi suatu kesatuan yang utuh dimana tidak ada spek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional.

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut.

Peranan organisasi internasional dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu:

1. Sebagai instrumen, organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena, organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun

masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.

3. Sebagai aktor independen, organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (**Perwita dan Yani,2005: 95**).

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa uni eropa adalah sebagai suatu organisasi internasional, apalagi uni eropa adalah organisasi regional pertama yang ada. Uni Eropa sebagai sebuah organisasi regional di kawasan Eropa yang telah mencakup berbagai bidang, juga memiliki beragam bentuk kebijakan. Dimana pada awal pembentukannya, hanya bidang ekonomi dan politik sebagai base dimation. Lewat perkembangannya, Uni Eropa memperluas bidang cakupannya ke bidang-bidang lainnya seperti bidang sosial, hukum, pertahanan keamanan, dan politik luar negeri. Negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan suatu organisasi internasional berhak meminta bantuan berupa saran, rekomendasi atau aksi langsung berkaitan dengan masalah-masalah dimana pemerintah tidak dapat mengambil resiko dengan hanya bertindak melalui kebijakan nasionalnya. Disini uni eropa sebagai organisasi internasional yang mewadahi yunani sebagai anggotanya memiliki tanggung jawab untuk mengatasi krisis ekonomi yang melanda yunani (**Perwita dan Yani,2005: 97**).

2.2.5 Interpedensi

Konsep interpedensi dapat dipakai untuk menggambarkan sifat sistem internasional saat ini, konsep ini menyatakan bahwa negara bukan aktor independen secara keseluruhan, malah negara saling bergantung satu sama lainnya,

tidak ada satu negara pun yang secara keseluruhan dapat memenuhi sendiri kebutuhannya, masing masing bergantung pada sumber daya dan produk dari negara lainnya. Karena itu kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara akan memberikan akibat yang cepat dan serius pada negara lainnya, bahkan kebijakan domestik pun bisa memiliki implikasi yang lebih luas ke negara lainnya.

Saling ketergantungan (interdependensi) dapat terjadi dalam berbagai isu, seperti ekonomi, politik dan sosial. Saling ketergantungan mengacu pada situasi yang di karakteristik dengan adanya efek resiprokal antara negara atau antara aktor negara yang berbeda, dimana efek ini kerap kali merupakan hasil dari transaksi internasional, yaitu aliran arus barang, uang, manusia, dan informasi yang melewati batas negara (**Perwita dan Yani.2005: 78**).

Konsep interdependensi sepertinya sangat cocok jika kita melihat apa yang terjadi di Yunani saat ini, dimana pemerintah Yunani tidak mampu lagi menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi, hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah Yunani yang menerima dana bailout guna menyelamatkan perekonomian negaranya.

2.2.6 Teori krisis ekonomi

Kondisi krisis ekonomi di suatu negara atau wilayah bisa berasal dari luar atau dari dalam negara/wilayah tersebut. Dari dalam, misalnya, terjadi suatu penurunan produksi komoditas tertentu secara mendadak. Sedangkan dari luar, misalnya, terjadi dari negara tertentu yang memberi imbas pada negara lain karena terjadi hubungan kebutuhan ekonomi. Krisis ekonomi mempunyai proses atau jalur-jalur transmisi dampak yang berbeda, dan sektor-sektor ekonomi yang

terkena dampak pun berbeda-beda. Tergantung besarnya keterkaitan-keterkaitan produksi, konsumsi, dan investasi dari sektor-sektor tersebut (**Tambunan 2011:4**) membahas sejumlah tipe-tipe krisis ekonomi yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia.

1. Krisis Perbankan: Dampak langsung atau fase pertama dari efek krisis perbankan adalah kesempatan kerja dan pendapatan yang menurun di subsektor keuangan. Pada fase kedua, krisis perbankan merembet ke perusahaan-perusahaan yang sangat tergantung pada sektor perbankan dalam pembiayaan-pembiayaan kegiatan produksi/bisnis mereka. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa lagi mendapatkan pinjaman dari perbankan karena perbankan sendiri mengalami kekurangan likuiditas. Atau juga perusahaan-perusahaan masih bisa mendapat pinjaman, tetapi dengan tingkat suku bunga yang jauh lebih tinggi dari keadaan normal. Akibat selanjutnya dari krisis keuangan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan tersebut adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Akibat lain dari ini, misalnya adalah kehilangan sejumlah uang tabungan, misalnya diatas ketentuan lembaga penjamin simpanan (**Tambunan, 2011:7**).

2. Krisis Nilai Tukar: Krisis ini terjadi jika sebuah mata uang mengalami perubahan/penurunan/depreseasi yang sangat besar dan berlangsung mendadak terhadap mata uang lain. Misalnya rupiah atas dollar AS. Dampak yang dirasakan langsung adalah aktivitas ekspor dan impor. Depresiasi nilai tukar dari suatu mata uang terhadap mata uang lain akan membuat daya saing harga dari produk-produk buatan negara yang mata uangnya tidak terdepresiasi, mengalami volume kenaikan ekspor. 39 Kenaikan volume

ekspor menambah volume produksi dan meningkatnya jumlah kesempatan kerja. Di sisi impor, misalnya, jika kurs rupiah melemah dari nilai tukar yang biasanya Rp. 8.000 per satu dollar menjadi Rp. 20.000 per satu dollar, maka akan membuat harga-harga dalam rupiah di pasar dalam negeri dari produk-produk impor akan naik, yang bahkan bisa mengakibatkan meningkatnya laju inflasi. Dalam tipe krisis ekonomi ini, jalur-jalur transmisi kuncinya adalah perubahan dalam volume ekspor dan impor **(Tambunan, 2011:10-14)**.

Bila dikaitkan dengan krisis ekonomi yang terjadi di Uni Eropa dan Yunani, dapat disimpulkan bahwa Krisis utang (yang dimana Yunani sebagai negara yang terkena dampak krisis ekonomi paling buruk melakukan peminjaman dana kepada Bank Sentral Eropa untuk mengantisipasi krisis ini berkepanjangan, namun pemerintah mengabaikan langkah-langkah yang diberikan oleh ECB sehingga dana yang dipinjam oleh pemerintah dianggap sebagai hutang oleh ECB) dan nilai tukar yang melanda zona Eropa menjadi babak baru ekonomi negara-negara Eropa menuju resesi. Krisis ini pada perkembangannya melanda hampir seluruh negara-negara Eropa pengguna mata uang Euro. Krisis yang berawal dari kredit macet di Yunani yang kemudian berdampak luas bagi negara-negara Eropa lain. Negara-negara penyokong ekonomi Eropa seperti Jerman, Perancis dan Italia juga terkena imbas dari krisis tersebut. Euro kemudian tertekan dan mengakibatkan penurunan angka pertumbuhan ekonomi negara-negara di zona Euro.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan pada pemaparan diatas, penulis memiliki asumsi utama, yakni, “dengan adanya peran UNI EROPA *melalui economic adjustment program (program penghematan ekonomi), the european financial stability facility* dan *the stability and grow pact*, maka krisis ekonomi Yunani dapat diminimalisir, yang di tandai dengan, berkurangnya hutang Yunani dan meningkatnya surplus anggaran yang di dapat oleh Yunani dari tahun ke tahun.

2.4 Operasional Variabel dan Indikator

VARIABEL (TEORITIS)	INDIKATOR (EMPIRIS)	VERIFIKASI (ANALISIS)
VARIABEL BEBAS: Adanya peran Uni Eropa melalui 3 program.	1. Dengan adanya economic adjustment program (program penghematan ekonomi)	1. Sebagai timbal balik dari bantuan negara-negara di zona Eropa sebesar 110 milyar Euro, diberlakukan EAP dituang dalam nota kesepahaman, yaitu memorandum of economic and financial policies (nota kebijakan ekonomi dan keuangan yang menjelaskan secara detail kebijakan apa saja yang harus diterapkan pemerintahan Yunani, pengendalian anggaran ini memiliki visi untuk mengurangi secara signifikan

	<ol style="list-style-type: none"> 2. The european financial stability facility 3. The stability and grow pact 	<p>defisit anggaran Yunani.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Di tandai dengan kesepakatan untuk bantuan kedua kepada Yunani yang ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2011, program ini bertujuan untuk mengamankan penurunan utang Yunani terhadap PDB dengan tujuan mencapai 120% pada tahun 2020. 3. The stability and grow pact adalah sebuah perangkat aturan untuk mendukung anggota negara untuk mempertahankan suara publik dalam hal financial, SGP memiliki 2 bagian yang pertama, divisi pencegahan yang akan memberikan peringatan awal untuk pengurangan ekstrim. Yang kedua, divisi sebagai pengoreksi pemerintah mengenai excessive deficit procedure (prosedur defisit berlebihan) yang akan merekomendasikan isu baru mengenai defisit anggaran sebuah negara kepada dewan untuk kemudian memberikan sanksi untuk negara anggota tersebut.
<p>VARIABEL TERIKAT: 1. maka krisis ekonomi Yunani dapat diminimalisir yang ditandai dengan berkurangnya hutang dan surplus anggaran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yunani menerima bantuan dari Uni Eropa, ECB dan IMF dalam hal bantuan dana dan pengawasan terkait ekonomi dalam negerinya. 2. Berkurangnya hutang Yunani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan pengawasan bersama melalui 3 program EAP, ESFS dan SGP dalam hal administrasi pajak dan usaha pemberantasan praktik pemangkiran pajak, manajemen financial publik, serta reformasi administrasi publik, termasuk didalamnya strategi-strategi untuk memperbaiki iklim bisnis. 2. Beban utang ditetapkan turun dari 180,4 persen dari output tahun ini menjadi 167,8 persen

	3. Surplus anggaran Yunani dari tahun ke tahun	(voaindonesia). 3. Menempatkan surplus anggaran dilivel 2,2 persen pada tahun 2017 dan 3,57 persen pada tahun 2018, diluar pembayaran utang(internasional.kontan).
--	--	---

2.5 Skema Kerangka Teoritis



